LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN

2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 berfungsi untuk memastikan bahwa setiap unit kerja dapat bertanggung jawab atas kinerjanya, sekaligus sebagai dasar bagi perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan perpajakan dan pengelolaan sumber daya negara. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 umumnya berfokus pada pencapaian dan evaluasi kinerja unit dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, serta kontribusi mereka dalam pencapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Laporan ini juga menjadi sarana untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan di level Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka reformasi perpajakan.

Beberapa poin utama dalam latar belakang penyusunan laporan kinerja KPP 2024 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Program

   Laporan kinerja KPP bertujuan untuk mengevaluasi apakah kantor tersebut telah berhasil mencapai target penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan ini juga mencakup sejauh mana program yang dirancang di KPP, seperti penyuluhan pajak, pemeriksaan, atau pelayanan konsultasi perpajakan, telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan

   Kantor Pelayanan Pajak memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada wajib pajak. Laporan kinerja ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa efektif KPP dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah, baik dalam hal pengurusan administrasi perpajakan maupun penanganan masalah yang dihadapi wajib pajak.

3. Pemenuhan Tanggung Jawab Administratif

   Laporan kinerja KPP disusun sebagai bagian dari kewajiban administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik dan pimpinan DJP mengenai bagaimana KPP telah menjalankan tugasnya sepanjang tahun. KPP harus melaporkan pencapaian indikator kinerja yang telah

ditetapkan, misalnya mengenai jumlah wajib pajak yang dilayani, tingkat kepatuhan pajak, dan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan.

4. Reformasi Perpajakan dan Peningkatan Kepatuhan

   Laporan kinerja juga mencerminkan sejauh mana KPP mendukung program reformasi perpajakan yang diinisiasi oleh DJP. Ini termasuk perbaikan sistem administrasi pajak, peningkatan kualitas data perpajakan, serta penguatan pengawasan untuk meminimalkan kebocoran pajak. Laporan ini dapat menggambarkan bagaimana KPP berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, melalui kegiatan seperti edukasi perpajakan, penyuluhan, serta kemudahan akses terhadap layanan perpajakan.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Organisasi

   Laporan kinerja juga mencakup evaluasi terhadap kualitas sumber daya manusia di KPP. Hal ini mencakup pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai, terutama dalam hal pengetahuan perpajakan, layanan pelanggan, dan penggunaan teknologi.

   Laporan ini memberikan gambaran mengenai kinerja organisasi di KPP, termasuk pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan DJP.

6. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

   Dengan adanya laporan kinerja, masyarakat dapat melihat seberapa baik KPP menjalankan tugasnya dan seberapa efektif instansi ini dalam melayani dan mengelola data wajib pajak. Ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas lainnya yang dibebankan kepada KPP Pratama adalah melakukan kegiatan ekstensifikasi di bidang perpajakan.

Fungsi KPP Pratama Depok Sawangan adalah sebagai berikut:

a. pelayanan pajak;
b. penyuluhan pajak;

c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. penatausahaan dan perpajakan, penerimaan penyimpanan dokumen dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
g. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
i. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
j. pengukuhan dan/atau pencabutan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
k. pemeriksaan pajak;
l. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
m. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
n. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
o. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
p. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
q. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
r. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
s. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
t. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi KPP Pratama Depok Sawangan tahun 2024 terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Pemeriksaan, penilaian, dan penagihan;
e. Seksi Pengawasan I;
f. Seksi Pengawasan II;
g. Seksi Pengawasan III;
h. Seksi Pengawasan IV;
i. Seksi Pengawasan V
j. Seksi Pengawasan VI
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan per 31 Desember 2024 sebanyak 97 orang yang terbagi dalam seksi-seksi secara

proporsional di setiap seksi sesuai dengan kebutuhan kantor untuk melayani pemangku kepentingan.

C. PERAN STRATEGIS KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN

KPP Pratama Depok Sawangan merupakan instansi vertikal hasil pemecahan wilayah kerja sebagaimana diatur dalam sebagai penerapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen) Nomor KEP-31/PJ/2015 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja. dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang beroperasi mulai tanggal 1 Oktober 2015. KPP Pratama Depok Sawangan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III.

Pelaksanaan Visi dan Misi KPP Pratama Depok Sawangan dilandasi oleh tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Depok Sawangan memikul beban tanggung jawab serta peran yang sangat strategis. yaitu:

”Mengamankan dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri”

.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja KPP Pratama Depok Sawangan selama tahun 2024. Capaian kinerja *(performance results)* 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja *(performance agreement)* 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Pratama Depok Sawangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I: **Pendahuluan.** menjelaskan secara ringkas tentang tugas dan fungsi. struktur organisasi. peran strategis KPP Pratama Depok Sawangan. serta sistematika pelaporan LAKIN;

Bab II: **Perencanaan Kinerja.** berisikan uraian singkat tentang perjanjian kinerja tahun 2024;

Bab III: Akuntabilitas Kinerja. berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran tahun 2024;

Bab IV: Penutup. menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh KPP Pratama Depok Sawangan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2021 tanggal 31 agustus 2021 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Renstra DJP tahun 2021 – 2024 telah melewati proses penyusunan yang cukup panjang. Dimulai tahun 2019 melalui tahapan penyusunan visi dan misi, dilanjutkan dengan tahapan pengembangan strategi serta tahapan terakhir yaitu penyelarasan dengan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders* telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Peta Strategi

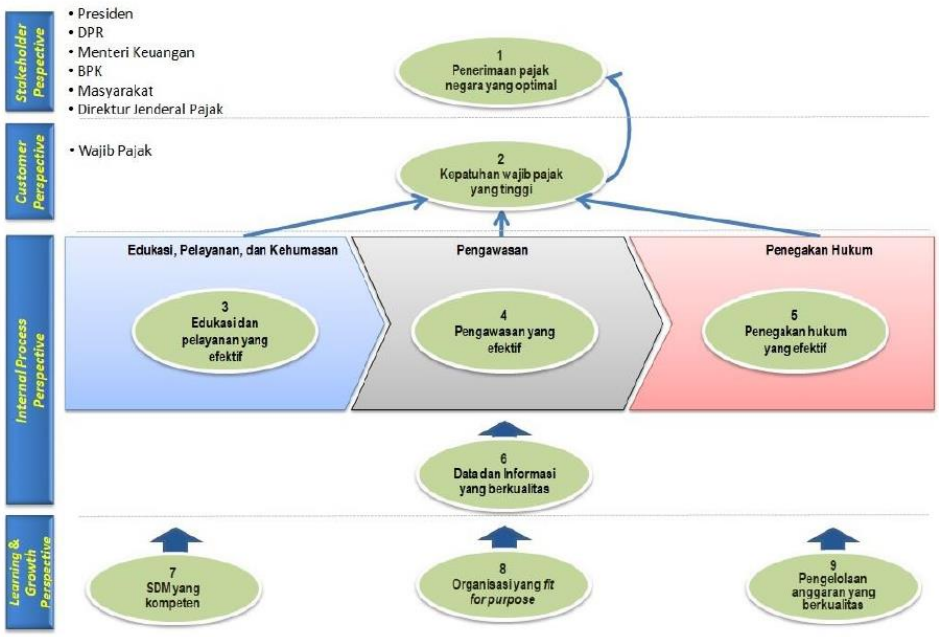

Gambar 1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak

Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut terdiri dari: SDM yang

kompeten, organisasi yang fit for purpose dan pengelolaan anggaran yang berkualitas yang masing-masing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya terdiri dari edukasi dan pelayanan yang efektif, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya dari proses tersebut diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. disebutkan bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis KPP Pratama Depok Sawangan tidak terlepas dari visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan tugas pokoknya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang pembiayaan pemerintah. Dalam tahun pajak 2024 rencana kinerja untuk pencapaian target penerimaan pajak KPP Pratama Depok Sawangan adalah sebesar Rp1.201.753.061.860 dan sudah mengalami penyesuaian pada triwulan III menjadi Rp1.245.770.726.000 dan triwulan IV yang menjadi target final untuk KPP Pratama Depok Sawangan sebesar Rp 1.261.084.402.000.

Target tersebut dirinci untuk masing-masing Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V dan Seksi Pengawasan IV

di lingkungan KPP Pratama Depok Sawangan yang ditetapkan secara realistis dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan pada tahun 2023. Adanya penyesuaian target yang terjadi di bulan Oktober dan Desember diperlukan sebagai rencana dalam mencapai tujuan organisasi bersama dengan KPP Pratama Depok Sawangan memiliki potensi lebih dan mampu mendapatkan penerimaan melebihi target awal.

V i s i

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

"Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efesien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusi dan Berkeadilan"

Dari penggalan kalimat visi yang pertama menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ingin menjadi suatu institusi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat. Efektif dan efisien artinya bahwa DJP melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut. Dipercaya oleh masyarakat memiliki arti yaitu DJP memastikan masyarakat yakin bahwa sistem administrasi perpajakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Modern, efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat mengacu kepada penyelenggaraan sistem dimana dibutuhkan peran dari sumber daya manusia sebagai subjek penyelenggara sistem tersebut. Peran sumber daya manusia diangkat melalui kata integritas dan profesionalisme, sehingga sistem administrasi perpajakan dimaksud di atas dilaksanakan oleh sumber daya manusia DJP yang berintegritas dan memiliki profesionalisme tinggi.

M i s i

Misi merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan. tugas. fungsi. peran dan tanggung jawab DJP sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijaksanaan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategi organisasi di dalam berbagai bidang dalam lingkungannya dimana Ditjen Pajak beraktifitas dan berinteraksi.

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan pengakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Misi DJP adalah:

1) **Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi indonesia;**
2) **Meningkatkan kepatuhan pajak melauli pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif; serta penegakan hukum yang adil; dan;**
3) **Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta apartaur pajak berintegritas, profesional, dan bermotivasi**

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi Wajib Pajak maupun bagi petugas guna meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

N i l a i

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, DJP berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- *Integritas* – Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan harus bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya serta menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
- *Profesionalisme* – Dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukanya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

- *Sinergi* – Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- *Pelayanan* – Berupaya untuk memberikan pelayanan dengan berorientasi pda kepuasan pemangku kepentingan dan bersikap proaktif dan cepat tanggap dalam memberikan pelayanan.
- *Kesempurnaan* – Senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Keyakinan Dasar

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Komitmen Terhadap SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerja sama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

Komitmen Terhadap Masyarakat

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis melalui pelayanan terbaik. serta menerapkan tata kelola yang baik

T u j u a n

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan yang ingin dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan adalah ikut menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor

pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi di Wilayah Kota Depok yang terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Beji, Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, Kecamatan Bojongsari, dan Kecamatan Sawangan.

Sasaran

Sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan pada tahun anggaran 2024 adalah tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak yaitu sebesar Rp1.261.084.402.000.- dan tentunya dengan tetap mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif. Yaitu perspektif dari *Stakeholder, Customer, Internal Process*, dan *Learning and Growth.* Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan.

Program yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Depok Sawangan selama tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Depok Sawangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;

7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
11. Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
12. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian;
13. Tingkat Efektivitas Penagihan;
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan;
16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;
17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM;
18. Indeks Penilaian Integritas Unit;
19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain, perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja ini merupakan perwujudan dari perencanaan kinerja beserta indikator keberhasilannya. Perencanaan kinerja adalah merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja yang dibuat pada awal tahun memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang ditetapkan dan indikator keberhasilannya.

Rencana kinerja KPP Pratama Depok Sawangan merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kerja unit vertikal dibawahnya yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing unit vertikal dalam bentuk LAKIN.

Perjanjian Kinerja KPP Pratama Depok Sawangan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
		Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
		Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;	90

10	Pengelolaan Keuangan yang optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPP Pratama Depok Sawangan adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran atau evaluasi tingkat capaian kinerja KPP Pratama Depok Sawangan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat Capaian Kinerja tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Sasaran Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	102,24%	102,24
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	106,35	106,35
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,18%	100,18
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100,31%	100,31
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	101,17%	101,17
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%	120,00
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	110,37%	110,37
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	113,54%	120,00

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120,00%	120,00
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	119,88%	119,88
		6c-N	Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	119,93%	119,93
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120,00%	120,00
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	84,44%	112,59
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120,00%	120,00
		8b-CP	Persentase penghimpunan data r egional dari ILAP	55%	77,00%	120,00
9	SDM yang kompeten	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	117,27	117,27
		10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	92,73	109,09
		10b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;	90	92,95	103,28
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi						108,81

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Persentase realisasi penerimaan pajak

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**50.00%**	**50.00%**	**75.00%**	**75.00%**	**100.00%**	**100.00%**
Realisasi	**52.06%**	**52.06%**	**73.09%**	**73.09%**	**100.24%**	**100.24%**
Capaian	**104.12%**	**104.12%**	**97.45%**	**97.45%**	**100.24%**	**100.24%**

Persentase realisasi Penerimaan Pajak Rutin melebihi target yang telah ditentukan. Adanya penyesuaian target di triwulan IV tidak menyebabkan perubahan yang

signifikan yang menghasilkan penerimaan tetap tercapai dan berhasil melebihi target yang ada. KPP Pratama Depok Sawangan memiliki capaian 102,24. KPP Pratama Depok Sawangan memiliki target yang telah ditentukan di awal tahun 2024 sebesar Rp1.201.753.061.860 dan sudah mengalami penyesuaian pada triwulan III menjadi Rp1.245.770.726.000 dan triwulan IV yang menjadi target final untuk KPP Pratama Depok Sawangan sebesar Rp 1.261.084.402.000. Realisasi Penerimaan KPP Pratama Depok Sawangan mencapai 102,24% di angka Rp1,264,110,392,091. Untuk selanjutnya KPP Pratama Depok Sawangan akan terus meningkatkan pengawasan program kerja yang sudah ditetapkan. (Pemanfaatan data Alket, Feeding, PKPM, Pengawasan kepatuhan Bendaharawan, dan lain-lain)

b. Tindakan yang telah dilaksanakan

1) Mengoptimalkan monitoring pembayaran masa
2) Melakukan himbauan pembayaran rutin
3) Membimbing AR untuk mendalami proses bisnis WP yang bersangkutan dalam rangka penggalian potensi
4) Sharing session pengalaman dan succses story antar AR

c. Rencana Aksi

1) Meningkatkan ritme pencapaian penerimaan pajak pada tahun berikutnya
2) Melakukan Pengawasan terhadap WP Strategis maupun WP kewilayahan secara komprehensif
3) Mengoptimalkan pemanfaatan data internal dan eksternal
4) Mempertajam analisa laporan keuangan
5) Meningkatkan kualitas penggalian potensi perpajakan

2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Realisasi	**110**	**110**	**108.43**	**108.43**	**106.35**	**106.35**
Capaian	**110.00%**	**110.00%**	**108.43%**	**108.43%**	**106.35%**	**106.35%**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

KPP Pratama Depok Sawangan pada tahun 2024 memiliki Capaian Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto sebesar 106,35% yang dihitung dari komponen yang ada yaitu 50% dari Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (112,69) ditambah dengan 50% dari indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas (100,00).

b. Tindakan yang telah dilaksanakan
   1) Terus melakukan penggalian potensi hingga tuntas
   2) Membentuk tim pairing guna menunjang penerimaan
   3) Penggalian potensi terhadap WP baru

c. Rencana Aksi
   1) Memprioritaskan tindakan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang memiliki tunggakan besar
   2) Mencari potensi pajak menggunakan media sosial
   3) Meningkatkan kualitas penggalian potensi perpajakan
   4) Memantau dan menganalisa WP yg mengalami penurunan setoran

3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**50.00%**	**50.00%**	**75.00%**	**75.00%**	**100.00%**	**100.00%**
Realisasi	**54.88%**	**54.88%**	**76.05%**	**76.05%**	**100.18%**	**100.18%**
Capaian	**109.76%**	**109.76%**	**101.40%**	**101.40%**	**100.18%**	**100.18%**

Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Depok Sawangan di tahun 2024 telah memenuhi target yang ditentukan. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan ditetapkan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP. Dengan target 100% (Rp 1,180,750,363,000) KPP Pratama Depok Sawangan telah berhasil melebihi target dengan capaian 100,18% (Rp 1,182,837,500,763). Tercapainya IKU ini membuktikan adanya peningkatan (korelasi positif perubahan behavior) Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran secara sukarela (voluntary comply) yang perlu dijadikan benchmark untuk melakukan pengawasan pembayaran masa (per jenis pajak), khususnya atas WP yang belum

melaksanakan kewajiban pembayaran masa dengan benar, baik yang bersumber dari kewajiban pajak pemotongan dan/atau pemungutan maupun kewajiban periodic masa tahunannya di tahun 2024.

b. Tindakan yang telah dilaksanakan
   1) Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan
   2) Penerbitan STP sesuai daftar nominatif
   3) Membuat LHPt atas data pemicu tahun berjalan yang tersedia di Approweb
   4) Membuat surat himbauan pendaftaran NPWP terhadap WP yang diduga mempunyai penghasilan melebihi PTKP

c. Rencana Aksi
   1) Optimalisasi pemanfaatan data intern dan ekstern
   2) Meningkatkan kerja sama dengan pemberi kerja dan pemda

4. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Capaian kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**80.00%**	**80.00%**	**90.00%**	**90.00%**	**100.00%**	**100.00%**
Realisasi	**83.03%**	**83.03%**	**92.15%**	**92.15%**	**100.31%**	**100.31%**
Capaian	**103.79%**	**103.79%**	**102.39%**	**102.39%**	**100.31%**	**100.31%**

Pada tahun 2024 tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi telah memenuhi target yang ditetapkan. Target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan sebesar 82.801 dan berdasarkan Aplikasi Mandor-DJP jumlah SPT Masuk sebesar 83.058 menghasilkan realisasi tingkat kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Depok Sawangan sebesar 100,31%. Tindakan yang telah dilaksanakan guna mencapai target 100% antara lain melakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT dengan cara mengirimkan whatsapp blast serta menerbitkan Surat Teguran atas Wajib Pajak yang belum melakukan pelaporan. Pada awal tahun yaitu bulan Januari sampai dengan April dibentuk juga Satuan Tugas untuk Loket Khusus Pelaporan SPT Tahunan. Tidak tercapainya target di tahun 2024 ini membawa kita untuk melakukan tindakan pendekatan ke Wajib Pajak lebih maksimal lagi dengan mengingatkan wajib pajak lebih intensif dan melakukan kunjungan langsung ke wajib pajak.

b. Tindakan yang telah dilaksanakan
   1) Menghimbau WP Badan dan OP untuk segera melaporkan SPT Tahunan

2) Menerbitkan Surat Teguran atas WP Wajib SPT yang belum melaporkan SPT
3) Membuat jadwal piket SPT yang telah dilaksanakan pada bulan Januari s.d April 2023
4) Kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan
5) Melakukan kegiatan *WA-blast* dan *email-blast*

c. Rencana aksi

1) Membuat surat teguran
2) Melakukan kunjungan kerja (visit) ke wajib pajak
3) Melakukan sosialisasi ke wajib pajak
4) Menghubungi WP melalui telp atau email dengan lebih intensif
5) Mengadakan kelas pajak untuk dapat mengedukasi WP melaporkan SPT

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

a. Capaian kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**50.00%**	**50.00%**	**75.00%**	**75.00%**	**100.00%**	**100.00%**
Realisasi	**31.59%**	**31.59%**	**45.37%**	**45.37%**	**101.17%**	**101.17%**
Capaian	**63.18%**	**63.18%**	**60.49%**	**60.49%**	**101.17%**	**101.17%**

Kegiatan Pengawasan Pembayaran Material KPP Pratama Depok Sawangan telah memenuhi target yang ditentukan. Target penerimaan pajak PKM sebesar 100% (Rp 80,334,039,000) tercapai 801,17% (Rp 81,272,891,328). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan ditetapkan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP. Sebagai salah satu komponen penerimaan yang bersumber dari effort, diperlukan kajian lebih lanjut khususnya evaluasi atas capaian IKU-IKU yang memberi dampak (berkorelasi) pada capaian IKU PKM, misalnya capaian IKU P4DK, IKU Pencairan Tunggakan, IKU Pemeriksaan, IKU Ketetapan Dibayar Tahun Berjalan, dll.

b. Kegiatan yang telah dilaksanakan

1) Meminta dan membimbing AR untuk melakukan analisa penggalian potensi hingga tuntas
2) Membimbing AR untuk mendalami proses bisnis usaha WP yang bersangkutan dalam rangka penggalian potensi
3) Memanfaatkan data yang ada untuk dilakukan penggalian potensi secara optimal

4) Menindaklanjuti SP2DK atas DPP dan Outstanding dengan maksimal
5) Menghimbau WP untuk melakukan Pembayaran SKP KB yang terbit
6) Melakukan visitasi dan konseling secara selektif dan terencana

c. Rencana aksi

1) Penyelesaian saldo potensi Approweb
2) Pengawasan TL LHA
3) Pengawasan WP yang melakukan transaksi afiliasi terindikasi TP
4) Optimalisasi pemanfaatan data internal dan eksternal untuk meningkatkan penerimaan PKM
5) Meningkatkan menjadi tindakan blokir rekening bank dan sita asset Penanggung Pajak setelah surat paksa disampaikan dan tidak ada tindak lanjut penyelesaiannya.
6) Optimalisasi Penagihan aktif dan persuasif.
7) Optimalisasi kegiatan Penilaian terhadap WP2 yang sedang melakukan kegiatan membangun.
8) Melakukan pengamatan terhadap obyek pengamatan terpilih dengan pembentukan 5 Tim Pengamatan.
9) Meningkatkan dan mengefektifkan aktifitas konseling untuk menyelesaikan SP2DK outstanding
10) Identifikasi dan optimalisasi galpot terhadap KLU WP yang tidak mengalami penurunan omzet pada saat pandemi Covid-19 misalnya apotik / distributor alkes, dan pengusaha salon/skin care.

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**40.00%**	**40.00%**	**60.00%**	**60.00%**	**74.00%**	**74.00%**
Realisasi	**81.86%**	**81.86%**	**86.03%**	**86.03%**	**88.80%**	**88.80%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tercapai 88,80% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74,00% Sehingga persentase pencapaianya adalah sebesar 120,00. Terdapat tiga komponen perhitungan IKU Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan, yaitu Rasio Kegiatan, Rasio Perubahan Perilaku Lapor, dan Rasio Perubahan Perilaku Bayar dengan bobot penghitungan masing-masing sebesar 30%, 30%, dan 40%. Dengan peningkatan penyuluhan dan humas akan menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.

b. Kegiatan yang telah dilaksanakan

1) Melaksanakan penyuluhan melalui media sosial, melaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada UMKM melalui aplikasi zoom dan melaksakan sosialisasi terhadap Bendahara melalui aplikasi zoom.
2) Melaksakan Penyuluhan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi lewat aplikasi zoom dengan metode one on one dan one to many.
3) Memberikan Konsultasi Helpdesk
4) Memberikan Konsultasi Non-Helpdesk melalui lewat WhatsApp

c. Rencana aksi

Pada setiap kegiatan Penyuluhan selain menggunakan data Wajib Pajak yang ada juga meminta bantuan AR untuk mengundang Wajib Pajak.

7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**5%**	**10%**	**5%**	**15%**	**85%**	**100%**
Realisasi	**6.33%**	**12.47%**	**6.00%**	**18.47%**	**110%**	**110%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**110.37%**

Realisasi IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kanwil dan KPP yang bersangkutan pada tahun berjalan. KPP Pratama Depok Sawangan dapat melampaui target tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan dengan nilai 110,37% dari target 100% sehingga memperoleh capaian sebesar 110,37. Hal itu terjadi karena kegiatan penyuluhan dan pelayanan dilakukan secara optimal dengan menggunakan metode pelayanan prima sehingga WP merasa

puas dan WP memberikan nilai pada indeks kepuasan dengan nilai yang sangat memuaskan.

b. Kegiatan yang telah dilaksanakan

1) Mengadakan survey pelayanan kepada wajib pajak
2) Meminta Wajib Pajak untuk memberikan ulasan di google riview
3) Memberikan Layanan Konsultasi di Helpdesk dengan baik
4) Memberikn Layanan Konsultasi lewat Telpon dan WhatsApp Konsultasi dengan baik.

c. Rencana Aksi

1) Memberikan Pelayanan dan Edukasi Terkait Informasi Perpajakan lewat Penyuluhan dan Helpdesk agar Wajib Pajak paham hak dan kewajibannya.
2) Meminta Wajib Pajak memberikan penilaian melalui Survei setelah kita memberikan pelayanan.

8. Persentase pengawasan pembayaran masa

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**90.00%**	**90.00%**	**90.00%**	**90.00%**	**90.00%**	**90.00%**
Realisasi	**110.73%**	**110.73%**	**107.95%**	**107.95%**	**113.54%**	**113.54%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**119.94%**	**119.94%**	**120.00%**	**120.00%**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Pengawasan Tindak Lanjut penyandingan data (Data Matching). Dengan target yang ditetapkan sebesar 90%, KPP Pratama Depok Sawangan telah memenuhi target dengan realisasi 113,54% sehingga presentase capaian adalah 120,00.

b. Kegiatan yang telah dilaksanakan

1) Penerbitan STP sesuai daftar nominatif
2) Penelitian data pemicu dan data penguji tahun berjalan
3) Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan
4) Membuat LHPt atas data pemicu tahun berjalan yang tersedia di Approweb
5) Membuat surat himbauan pendaftaran NPWP terhadap WP yang diduga mempunyai penghasilan melebihi PTKP

c. Rencana Aksi

1) Pengawasan pembayaran Masa WP untuk tahun berjalan
2) Himbauan pelaporan dan pembayaran masa tahun berjalan

3) Penerbitan STP
4) Penelitian SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN untuk melihat potensi dinamisasi
5) Pemanfaatan data eksternal secara optimal

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**118.71%**	**118.71%**	**114.14%**	**114.14%**	**120.00%**	**120.00%**
Capaian	**118.71%**	**118.71%**	**114.14%**	**114.14%**	**120.00%**	**120.00%**

Capaian IKU P4DK Strategis diperoleh dari "Komponen Penelitian" dan "Komponen Tindak Lanjut" (Gabungan dari Penyelesaian DPP dan Penyelesaian SP2DK *Outstanding*). Capaian IKU P4DK Kewilayahan diperoleh dari "Komponen Kuantitas" (LHP2DK dari DPP dan LHP2DK dari SP2DK *Outstanding*) dan "Komponen Kualitas". Target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ditetapkan sebesar 100% KPP Pratama Depok Sawangan berhasil mencapai target dengan realisasi 120,00%.

b. Kegiatan yang telah dilaksanakan

1) Meningkatkan perekaman himbauan pada aplikasi Approweb
2) Mengingatkan AR untuk segera menghimbau WP
3) Berusaha mengusulkan DPP yang berkualitas
4) Melakukan analisis Laporan Keuangan Wajib Pajak
5) Melakukan visit

c. Rencana aksi

1) Mendorong dan memantau AR agar melakukan visit ke WP yang belum memberikan respon atas SP2DK sampai dengan batas waktu yang ditentukan
2) Menghubungi WP melalui telp atau email dengan lebih intensif
3) Koordinasi dan sinergi dengan Fungsional Pemeriksa terkait SP2DK WP Strategis
4) Penyusunan SP2DK Komprehensif

10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**114.60%**	**114.60%**	**116.73%**	**116.73%**	**119.88%**	**119.88%**
Capaian	**114.60%**	**114.60%**	**116.73%**	**116.73%**	**119.88%**	**119.88%**

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. KPP Pratama Depok Sawangan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi 119,88%. Dengan tercapainya IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan membuktikan telah secara optimal pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak.

b. Kegiatan yang telah dilaksanakan

1) Penerbitan STP selain tahun berjalan sesuai daftar nominatif
2) Penelitian data pemicu dan data penguji selain tahun berjalan
3) Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan
4) Membuat LHPt atas data pemicu selain tahun berjalan yang tersedia di Approweb
5) Menindaklanjuti LHPt dengan SP2DK atas DPP
6) Membuat surat himbauan atas data pemicu selain tahun berjalan

c. Rencana aksi

1) Mendorong dan memantau AR agar melakukan visit ke WP yang belum memberikan respon atas SP2DK sampai dengan batas waktu yang ditentukan
2) Menghubungi WP melalui telp atau email dengan lebih intensif
3) Koordinasi dan sinergi dengan Fungsional Pemeriksa untuk usulan pemeriksaan
4) Menerbitkan STP

11. Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**120.00%**	**120.00%**	**103.65%**	**103.65%**	**109.93%**	**109.93%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**103.65%**	**103.65%**	**109.93%**	**109.93%**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku

pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. KPP Pratama Depok Sawangan telah mencapai realisasi sebesar 109,93% dari target 100%.

b. Tindakan yang telah dilaksanakan

Segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Nota Dinas penugasan pemeriksaan sampai dengan terbit SP2

c. Rencana Aksi

1) Lebih intensif dalam melakukan penggalian potensi, misalnya bedah WP
2) AR melakukan penelitian menyeluruh termasuk memperbanyak analisa mandiri

12. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**116.00%**	**116.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**
Capaian	**116.00%**	**116.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan penilaian di KPP Pratama Depok Sawangan telah melebihi target yang ditentukan sebesar 100,00%, KPP Pratama Depok Sawangan mencapai realisasi sebesar 120,00% sehingga pemeriksaan di KPP Pratama Depok Sawangan dapat dikatakan sebagai pemeriksaan yang sangat efektif dan bisa meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan. Jumlah Laporan Penilaian yang diselesaikan tepat waktu juga membuktikan kinerja Fungsional Penilai Pajak pada KPP Pratama Depok Sawangan telah menunjukan kinerja secara maksimal dalam memenuhi target yang diberikan.

b. Tindakan yang telah dilaksanakan

1) Fungsional Pemeriksan Pajak membuat komitmen penyelesaian atas pemeriksaan berdasarkan DSPP.
2) Membuat prognosa pencairan atas pemeriksaan berdasarkan DSPP.
3) Melakukan pembahasan atas Kertas Kerja Analisis antara Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

c. Rencana Aksi

1) Penyelesaian tunggakan pemeriksaan berdasarkan DSPP.

2) Pengawasan penyelesaian tunggakan berdasarkan komitmen yang ditetapkan.
3) Melakukan pembahasan bersama komite kepatuhan.

13. Tingkat Efektivitas Penagihan

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	23.89%	23.89%	39.81%	39.81%	84.44%	84.44%
Capaian	79.63%	79.63%	88.47%	88.47%	112.59%	112.59%

Tingkat Efektivitas Penagihan diperoleh dari komponen Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran, Lelang, dan Cegah. Berdasarkan tindakan penagihan yang aktif dilakukan oleh petugas Penagihan KPP Pratama Depok Sawangan, dengan target yang ditetapkan 75% berhasil tercapai dengan realisasi 84,44% sehingga Tindakan Penagihan di KPP Pratama Depok Sawangan dapat dikatakan sebagai tindakan penagihan yang sangat efektif untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.

b. Tindakan yang telah dilaksanakan

Memeriksa wajib pajak yang berpotensi wanprestasi dan tidak akan melunasi pembayaran utang pajaknya, kemudian melakukan tindakan pemblokiran rekening, penyitaan aset dan pencegahan

c. Rencana Aksi

1) Mengundang wajib pajak yang berpotensi wanprestasi ke Kantor Wilayah untuk dilakukan diskusi mengenai pelunasan utang pajak.
2) Klaster wilayah wajib pajak yang telah terbit Surat Paksa dan dijadwalkan untuk disampaikan dalam waktu yang sama
3) Skala prioritas pencairan atas ketetapan yang besar seperti Cipta Ekatama Nusantara SKPKB Rp. 19 Miliar

14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0.00%	0.00%	120.00%	120.00%	100.00%	100.00%

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP Pratama Depok Sawangan telah mengajukan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT. Aluphi Hijau Lumina dan telah disetujui sehingga realisasi mencapai target sebesar 100%.

b. Tindakan yang telah dilaksanakan

1) Melakukan pairing antara Seksi Pengawasan dengan Tim Pemeriksa.
2) Melakukan pembahasan dalam rapat Tim Komite Kepatuhan Tingkat KPP
3) Mengusulkan WP yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan
4) Telah dilakukan pembahasan dengan Kanwil atas WP yang diusulkan pemeriksaan Bukper (Rabu 26 Juni 2024), dan pada saat pembahasan sudah disetujui Kanwil untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaa

c. Rencana Aksi

1) Melakukan pairing antara Seksi Pengawasan dengan Tim Pemeriksa atas Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan.
2) Melakukan pembahasan satu bulan sebelum jatuh tempo pengusulan DSPP, sehingga Wajib Pajak yang diusulkan dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.

15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	49.56%	49.56%	116.48%	116.48%	120.00%	120.00%
Capaian	99.12%	99.12%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi. KPP Pratama Depok Sawangan telah melampaui target 100% dengan realisasi 120,00%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Depok Sawangan telah bekerja maksimal dalam menyediakan data dan potensi perpajakan guna menggali pajak demi tercapainya target yang telah ditentukan.

b. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan perekaman alket yang berasal dari Seksi Pengawasan
2. Melakukan pengiriman data perpajakan kepada KPP lain

c. Rencana Aksi

1. Memperbanyak kegiatan yang dapat menghasilkan data potensial
2. Menyegerakan perekaman data ke aplikasi alket
3. Melakukan tagging alamat wajib pajak di lokasi WP
4. Melakukan monitoring perekaman alket pada aplikasi

16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	67.67%	67.67%	77.00%	77.00%	77.00%	77.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP. KPP Pratama Depok Sawangan telah melampaui target 55,00% dengan realisasi 77,00%. Hal ini membuktikan telah terjalinnya kerja sama yang kooperatif antar DJP-DJPK-Pemerintah Daerah, serta bentuk kerja sama lainnya.

b. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan perekaman alket yang berasal dari Seksi Pengawasan
2. Melakukan pengiriman data perpajakan kepada KPP lain

c. Rencana Aksi

1. Memperbanyak kegiatan yang dapat menghasilkan data potensial
2. Menyegerakan perekaman data ke aplikasi alket
3. Melakukan tagging alamat wajib pajak di lokasi WP

17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	110	110	120	120	117.27	117.27
Capaian	110%	110%	120%	120%	117%	117%

Standar Kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran terbagi menjadi 3 yaitu Hasil Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV, Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum, dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak. Dari 11 Pejabat Struktural, 13 Pelaksana Umum dan 1 Pejabat Fungsional, 25 Pegawai dinyatakan lulus dan mendapatkan nilai diatas standar. Pelaksanaan Kebintalan telah dilakukan sesuai ketentuan dan dilaporkan dalam jangka waktu yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut, KPP Pratama Depok Sawangan berhasil mendapatkan realisasi 117,27 dari target yang ditetapkan untuk Pemenuhan Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Kebintalan SDM.

b. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Membuat ND kepada pegawai agar melaksanakan e-learning KLC atau studia untuk menambah pemahaman materi
2. Memberi Pengumuman kepada Pegawai yang akan mengikuti ujian
3. Menyampaikan materi yang akan dijadikan ujian
4. Kepala Unit Kerja terlibat dalam setiap agenda kantor sebagai media pemberian pembinaan mental kepada seluruh pegawai

c. Rencana Aksi

1. Meningkatkan kegiatan IHT kepada pegawai untuk pembekalan materi
2. Menyarankan pegawai untuk lebih banyak mengikuti diklat yang ada
3. memberikan pemahaman atas standar kompetensi yang diujikan

18. Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target			85	85	85	85
Realisasi			100	100	92.73	92.73
Capaian			118%	118%	109%	109%

Penilaian integritas unit merupakan pengukuran dengan survei yang ditujukan kepada pihak eksternal yang dibagi dari 4 komponen utama yaitu Pelayanan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan. Dari indeks target 85 telah berhasil mendapatkan realisasi indeks sebesar 92,73 yang menghasilkan capaian 109,09. Hal ini menunjukan bahwa Pegawai KPP Pratama Depok Sawangan telah bekerja secara

professional dan mengutamakan integritas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

b. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Mengumpulkan Long-list Responden SPIU 2024 dengan kriteria wajib pajak yang menggunakan layanan selama 6 bulan terakhir dan atas rekomendasi seksi terkait

2. Mengirimkan Broadcast ke wajib pajak untuk melakukan pengisian survei

3. Melakukan pemantauan progress pengisian link survei

c. Rencana Aksi

1. Menekankan kepada peagwai agar selalu menerapkan kode etik dan perilaku ke pegawai

2. memberikan reminder kepada wajib pajak untuk mengecek email

19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	47	47	70	70	90	90
Realisasi	54.15	54.15	81.93	81.93	92.95	92.95
Capaian	115%	115%	117%	117%	103%	103%

Persentase efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 92,25 dari target sebesar 90 sehingga pencapaian untuk KPP Pratama Depok Sawangan adalah sebesar 103,28. Komponen kontribusi capaiannya berasal dari penggabungan capaian Pelaksanaan Manajemen Kinerja yang telah sesuai menyampaikan materi yang ditentukan dan dilaksanakan dalam periode tertentu. Pelaksanaan Manajemen Risiko telah dilakukan dengan maksimal dengan capaian kegiatan 100%.

b. Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Membuat daftar kejadian yang perlu dilakukan mitigasi pada awal tahun dan membuat perencanaan pemantauan secawa triwulanan atau semesteran

2. Memantau secara berkala atas pelaksanaan kegiatan mitigasi risiko

3. Memastikan dialog kinerja organisasi dilaksanakan secara efektif, baik waktu pelaksanaan dan kelengkapan administrasi

4. Melakukan himbauan kinerja kepada seluruh pegawai dan memastikan pegawai memahami aturan terkait pengelolaan kinerja

c. Rencana Aksi

1. Selain pengawasan secara triwulanan yang dilakukan oleh Staf Manajer Risiko, pelaksanaan mitigasi risiko diawasi langsung oleh atasan dari masing-masing seksi penanggung jawab

2. Melakukan Monitoring Progress NKO yang dilakukan setiap bulan

3. Melakukan Pemantauan terhadap pelaksaan Rencana Mitigasi Risiko kepada masing-masing seksi pengampu secara rutin

20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

a. Capaian Kinerja

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Realisasi	**104.99**	**104.99**	**120**	**120**	**120**	**120**
Capaian	**104.99%**	**104.99%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**

Penyerapan anggaran dan nilai Efisiensi untuk KPP Pratama Depok Sawangan belum terserap dengan baik. Target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 100 (95,50%) dan terealisasi sebesar 99,75 sehingga capaian persentase kualitas pelaksanaan anggarannya adalah sebesar 120,00. Sebagai bentuk upaya pencapaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya, maka perlu dilakukannya monitoring atas kegiatan penyerapan anggaran dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan.

b. Tindakan yang telah dilaksanakan

Pengawasan pelaksanaan anggaran melalui rapat perencanaan anggaran dan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran serta revisi anggaran bila dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan.

c. Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring atas kegiatan penyerapan anggaran

2. Memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan outputnya

3. menyusun revisi DIPA atas RPD per triwulan

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam memenuhi target IKU dibiayai sepenuhnya dari DIPA KPP Pratama Depok Sawangan tahun 2024. Alokasi anggaran dana yang diberikan untuk Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak selama tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut

IKU Q4		Realisasi	Perhitungan
50%	**IKPA**	**99,75**	**49,88**
50%	**SMART**	**100,00**	**50,00**
		Total	**99,88**

Indikator Kualitas Pelakasanaan Anggaran		**Capaian Triwulan IV**
A	**Nilai IKPA**	**99,75**
1	Revisi DIPA	**10,00**
2	Hal.III DIPA	**15,00**
3	Penyerapan Anggaran	**19,83**
4	Belanja Kontraktual	**10,00**
5	Penyelesaian Tagihan	**10,00**
6	Pengelolaan UP dan TUP	**9,91**
7	Dispensasi SPM	**0,00**
8	Capaian Output	**25,00**
B	**Nilai SMART**	**100,00**
	Nilai Capaian PKPA Triwulan IV	**99,88**

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, terus dilakukan upaya signifikan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di berbagai aspek. Di bidang anggaran, pengelolaan keuangan dilakukan secara lebih cermat dan terarah, memastikan setiap alokasi dana tepat guna dan sesuai prioritas. Sumber daya manusia dioptimalkan dengan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang relevan, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung produktivitas. Dari sisi organisasi, dilakukan perbaikan dalam struktur dan sistem kerja yang lebih terkoordinasi, sehingga dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan meningkatkan efektivitas operasional. Pemanfaatan aset, baik itu fasilitas maupun peralatan, juga dikelola dengan lebih efisien, sehingga mengurangi pemborosan. Selain itu, dalam hal teknologi informasi, organisasi semakin memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi, yang tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi data dan mempermudah pelayanan kepada wajib pajak. Upaya-upaya ini secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun dan disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tuntutan reformasi di era keterbukaan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sasaran atau target yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan tidak lepas dari misi Fiskal Direktorat Jenderal Pajak yaitu untuk menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai yang berada dibawah unit kerja KPP Pratama Depok Sawangan telah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk turut menyukseskan program dan kegiatan demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan yaitu tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 1.261.084.402.000.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang kiranya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu dalam menghadapi tuntutan Reformasi di segala bidang dan dalam rangka memasuki era globalisasi dan transparansi.
2. Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak disertai dengan pengembangan metode penggalian potensi perpajakan di wilayah kerja
3. Menyeleksi dan menentukan WP yang akan dilakukan pemeriksaan dan melakukan penagihan aktif sehingga WP tersebut dapat membayar seluruh hutang pajaknya

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini. diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode tahun-tahun berikutnya.

Depok, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Depok Sawangan

Ditandatangani secara elektronik

Muhammad Herijanto Wahjudi Utomo
NIP 197110271996031001